

BAB IV

KESIMPULAN

BAB V

KESIMPULAN

Dengan keluarnya maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, maka lahirlah sistem multi partai dan koalisi antar partai. Dalam koalisi ini kadang terdapat pertentangan antara kebijakan partai-partai yang ada di Kabinet. Partai politik yang tidak puas terhadap kebijakan kabinet, menarik menteri-menternya dari kabinet. Kabinet yang merasa dirinya tidak lagi mendapat dukungan suara mayoritas di DPR, menyerahkan mandatnya, dengan demikian kabinet bubar. Sementara itu pemberontakan bersenjata di dalam negeri makin meluas seperti DI-TII atau PRR/PERMESTA. Atas desakan dari ABRI, Presiden Soekarno mengeluarkan UUKB (Undang-undang Keadaan Bahaya) pada 1957. Kemudian akibat konflik dengan partai Komunis, yang menuntut pengembalian perusahaan Asing hasil nasionalisasi kepada para buruh/rakyat dimana perusahaan asing hasil nasionalisasi tersebut sebagian besar dikuasai oleh militer. Militer yang bertambah kuat semenjak hukum keadaan darurat, ABRI menggalang kekuatan dengan pendirian Badan Kerja Sama.

Setelah keluarnya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengangkat wakil-wakil golongan karya di tubuh Parlemen. Atas dorongan dari ABRI, utamanya organisasi MKGR, SOKSI dan KOSGORO maka dibentuklah organisasi Sekber Golkar pada 20 Oktober 1964 yang anggotanya terdiri dari golongan karya yang duduk di lembaga negara. Setelah terjadi gerakan 30 September

1965. Presiden Soeharto dan militer yang dicap sebagai pembawa Supersemar, mencari legitimasi terhadap dwi-fungsi ABRI, maka pemilu yang dilaksanakan secepatnya menjadi tertunda dan akhirnya diselenggarakan pada 1971. Hal ini karena pemerintahan Orde Baru memutuskan untuk menggunakan Sekber Golkar sebagai alat legitimasi politik, masih dikuasai oleh orang-orang Soekarno. Maka para pemuka Sekber Golkar yang sangat mendukung Soekarno, banyak yang disingkirkan.

Sekber Golkar yang memutuskan sebagai kontestan pemilu 1971, akhirnya dibantu oleh kekuatan dari pemerintah dan ABRI. Mungkin karena menyadari kekuatan PNI yang memperoleh mayoritas pada pemilu 1955, mengandalkan kekuatannya pada birokrasi, maka Sekber Golkar juga mengandalkan kekuatannya pada monoloyalitas pada pegawai negeri. Organisasi Sekber Golkar yang paling berpengaruh adalah organisasi Trikarya (KOSGORO, MKGR, SOKSI), namun ketiga organisasi ini mengalami kelambanan di Jawa Timur, namun Sekber Golkar memperoleh banyak keuntungan dari Ikabra (Ikatan Keluarga Brawijaya) dibawah Moch Said, seorang militer yang anti komunis dan dikaryakan sebagai ketua DPRD GR Jawa Timur pada 1967-1971 akibat dwifungsi ABRI.

Dengan memandang sistem sosial dan birokrasi di Jawa Timur yang berpola "Bapakisme", kedudukan Sekber Golkar yang pada pemilu 1971 lebih sering disebut "Golkar" dalam mengambil kebijakan tergantung pada di tingkat atas dengan pola hubungan kekuasaan yang diartikan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma atau kekuatan fisik. Hampir tidak dijumpai peran dari bermacam-macam organisasi profesi yang ada di

tubuh Sekber Golkar. Keputusan sebagian besar hanya diputuskan di tingkat atas, misalnya di tangan Ali Murtopo dengan Opsusnya yang secara hierakhi tidak duduk dalam tubuh Sekber Golkar, namum perannya sangat menonjol pada pemilu 1971. Sebagian besar kemenangan Sekber Golkar pada pemilu 1971 ditentukan oleh strategi dari tingkat atas dari monoloyalitas melalui tokohnya Amir Machmud, serta para militer dari kodam, kodim sampai babinsa.

Para pegawai negeri dari tingkat atas sampai ke lurah-lurah berlomba-lomba memenangkan Golkar (di wilayah adminitratif yang menjadi wewenangnya, sampai bantuan uang yang diatasnamakan atas usaha dari Golkar.

Tekanan dari para aparat militer telah membuat trauma bagi partisan ataupun keluarga pendukung partai komunis. Para partisan itu mangalami trauma bila tidak memilih Golkar, maka peristiwa seperti 1965 akan terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA